

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG TANGGUNG  
JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN  
PEMBIAYAAN AKAD *MUSHARAKAH* ORANG TUANYA  
PADA BANK SUMUT SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh

Putri Gita Cahyani

NIM. C92215126



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putri Gita Cahyani

NIM : C92215126

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab  
Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan  
Akad Mushārahakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut  
Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2019

Saya yang menyatakan,



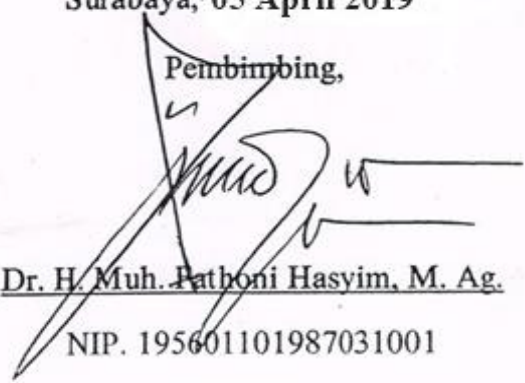
Putri Gita Cahyani  
NIM: C92215126

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.

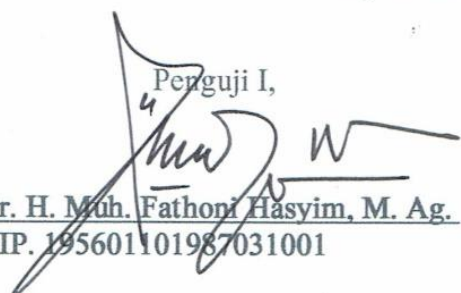
NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Putri Gita Cahyani NIM. C92215126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.  
NIP. 195601101987031001

Penguji II

  
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III,

  
Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEL.  
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,

  
Agus Solikin, S.Pd, M.Si  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 11 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003





**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Gita Cahyani  
NIM : C92215126  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [gitaza27@gmail.com](mailto:gitaza27@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya pada Bank Sumut Syariah.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2019

Penulis

Putri Gita Cahyani



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Mushārahakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui jawaban mengenai bagaimana kasus posisi tentang perkara nomor Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn. dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad mushārahakah orang tuanya pada Bank Sumut Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian library research. Data penelitian ini menggunakan Sumber sekunder, yang didapat melalui web dokumen putusan Mahkamah Agung, undang-undang, dan beberapa buku. Analisis data menggunakan tehnik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas dan faktual tentang permasalahan yang dikaji. Lalu berfikir dengan pola deduktif.

Dalam penelitian dapat disimpulkan pertama, terkait kebolehan melanjutkan akad mushārah yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, aqad menjadi mauquf ketika anak kecil yang masih belum cakap hukum dibebani tanggungjawab atas pelunasan atau penerusan akad mushārah yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Sejalan dengan buah pemikiran diatas, maka penulis mempunyai saran yang perlu di cantumkan yakni sebaiknya dalam bertindak hukum, anak di bawah umur tidak perlu dicantumkan. Ini dikarenakan tindakan hukum pasti juga mengakibatkan suatu akibat hukum yang harus dipikul oleh anak di bawah umur tersebut. Untuk itu sebaiknya Majelis Hakim memberi putusan untuk menolak gugatan dari dan atau untuk anak yang belum cakap hukum.

## DAFTAR ISI

## Halaman

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MUSHĀRAKAH</i></b>	
A. Pengertian Akad <i>Mushārah</i> .....	23
B. Dasar Hukum Akad <i>Mushārah</i> .....	25
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Mushārah</i> .....	27
D. Jenis-jenis <i>Mushārah</i> .....	30
E. Skema Akad <i>Mushārah</i> .....	33
F. Berakhirnya Akad <i>Mushārah</i> .....	35

G. Hikmah Akad <i>Mushārahah</i> .....	36
<b>BAB III DESKRIPSI DUDUK PERKARA NOMOR 124/PDT.G/2013 /PTA.MDN</b>	
A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan .....	37
B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn .....	41
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN PEMBIAYAAN AKAD <i>MUSHĀRAKAH</i> ORANG TUANYA PADA BANK SUMUT SYARIAH</b>	
A. Analisis kasus posisi tentang perkara Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn.....	48
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad <i>Mushārahah</i> Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah .....	54
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>





## DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	ʿ
4.	ث	Th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	Kh	ك	k
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	Dh	م	m
10.	ر	R	ن	n
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	Sh	ء	ʾ
14.	ص	s	ي	y
15.	ض	d		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

anda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fatḥah</i>	A
اِ	Kasrah	I
اُ	ḍamah	U





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dekade terakhir ini, istilah Bank Syariah telah meluas dan dikenal dunia. Bank syariah telah berkembang pesat dan menjadi satu trend yang sangat penting dalam dunia keuangan. Hal penting yang menjadikan Bank Syariah begitu diapresiasi oleh dunia terutama oleh kalangan muslim ialah bank syariah memiliki aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu produk bank syariah juga mengakomodasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan keinginan konsumen.

Bank syariah sama sekali tidak membebankan bunga sebagaimana bunga yang ditetapkan di bank konvensional. Karena menurut prinsip Islam bunga tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ali ‘Imran ayat 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran ayat 130).<sup>1</sup>

Selain itu bank syariah juga mempunyai sistem yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu jika bank konvensional menggunakan sistem yang disebut bunga. Sedangkan di perbankan syariah

<sup>1</sup>Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Dapatermen Agama, 1989), 97

menggunakan sistem bagi hasil (*revenue sharing*) antara pihak bank (*kreditur*) dengan nasabah (*debitur*).<sup>2</sup>

UUPI (Undang-Undang Perbankan Indonesia) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengaturnya dalam pasal 1, butir 12. UUPI memberikan batasan prinsip hukum Islam sebagai aturan kegiatan perbankan harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang *shariah*.<sup>3</sup> Kegiatan perbankan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, antara lain yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*).<sup>4</sup>

Dengan adanya aturan tersebut, maka pantaslah jika tidak sedikit umat Islam yang beralih dari bank konvensional menuju ke bank syariah sehingga bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *mudārabah* dan *mushārahah*.<sup>5</sup> Namun jika ditinjau dari ekonomi makro Indonesia, penulis berpendapat bahwa akad *mushārahah* adalah akad pembiayaan yang paling membantu

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup>Rival Veitzal dan Arvivan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 32.

<sup>5</sup>Trimuloto, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* ("Analisis Potensi Produk Musharakah Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM") (Sulawesi Selatan: T.p, 2017), 42.



Pembiayaan *mushārah* adalah bentuk pembiayaan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Akad *mushārah* ini termasuk dalam akad yang rentan menjadikan bank syariah dan nasabahnya bersengketa karena termasuk dalam pembiayaan yang berjangka waktu panjang dan beresiko tinggi. Jadi meskipun menggunakan prinsip-prinsip Islam, Bank Syariah juga acapkali terlibat persengketaan dengan nasabah.

<sup>7</sup>Rival Veitzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 411.

menjalankan kewajiban (*wanprestasi*), keadaan memaksa (*overmach*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).<sup>8</sup>

Ketika dalam proses transaksi antara pihak bank dengan nasabahnya tersebut terjadi sengketa, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan / perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke pengadilan), dan dengan cara persidangan yang diselesaikan di pengadilan.<sup>9</sup>

Sengketa ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam dan ia berniat memakai prinsip syariah sejak awal adalah wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan yang berbunyi *“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”*.<sup>10</sup>

Di beberapa daerah terdapat permasalahan unik tentang akad pembiayaan *mushārah* yang sampai dibawa ke muka pengadilan agama. Sebagaimana yang termaktub dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.

Duduk perkara tersebut bermula dari Almarhum Ongku Sutan Harahap yang melakukan pembiayaan *mushārah* dengan PT Bank Sumut Syariah

<sup>8</sup>Lukman Santoso *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 73.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 68.

<sup>10</sup> Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan pengadilan



Tergugat I dan Tergugat II, memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan, pembiayaan, almarhum, Ongku, Sutan Harahap tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Sedangkan telah diketahui bahwasanya terdapat ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap yang masih di bawah umur yakni Ali Umar Harahap (17 Tahun) Dan Rudy Machmud Harahap (15 tahun). Mereka juga dilibatkan dalam pelunasan utang orang tuanya yang meninggal

[illegible]

dalam pertengahan akad *mushārah* karena mereka termasuk ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap.

Selain itu, bank SUMUT Syariah juga mempunyai kesalahan. Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal sebelum ia menikmati seluruh hasil dari akad pembiayaan tersebut. Namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tetap menuntut pelunasan dari seluruh pembiayaan tersebut.

Jika pihak Tergugat I dan Tergugat II meminta ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan *mushārah* tersebut. Maka bagaimana hukumnya ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap yang merupakan anak di bawah umur tersebut dilibatkan dalam pertanggungjawaban atas pelunasan pembiayaan *mushārah* orang tuanya?

Allah berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.” ( Q.S. Annisa ayat 11).*<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan memberikan definisi tentang batasan usia seseorang yang dapat dikatakan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Ouran dan Terjemahannya* , 116

<sup>13</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi masalah penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.
2. Perjanjian pembiayaan *mushārah* melibatkan agunan Sertifikat Hak Milik.
3. Nasabah dalam akad *mushārah* meninggal dunia.
4. Ahli waris dituntut untuk melakukan pelunasan dari seluruh pembiayaan *mushārah*.

[illegible]



- Mengingat adanya keterbatasan dalam pembahasan kajian, maka penulis membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

- ### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus posisi tentang perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad *mushārah* orang tuanya pada Bank Sumut Syariah?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak peneliti yang membahas tentang berakhirnya akad *mushārah*. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan *mushārah* orang tuanya, atau yang sama dengan penulis bahas. Berikut ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan permasalahan yang diteliti penulis:

1. Skripsi dengan judul "Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", ditulis oleh Modakir Soleh (13220048), mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Modakir Soleh ini membahas tentang perbandingan konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pembahasan skripsi ini terdapat tiga pembahasan.

*Pertama* yakni tentang konsep perbandingan hukum, di antaranya yaitu pengertian perbandingan hukum, kegunaan atau manfaat perbandingan hukum. *Kedua* adalah konsep persekutuan, meliputi pengertian persekutuan, pendirian persekutuan, aspek hubungan internal

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menyinggung tentang berakhirnya akad *mushārah*. Mudhakir Sholeh menguraikan perbedaan antara konsep persekutuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konsep *Shirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konsep *Shirkah* tersebut menyangkut tentang bagaimana berakhirnya *shirkah* yang mana pembahasan tersebut hampir sama dengan skripsi penulis. Karena dalam skripsi yang diteliti oleh penulis terdapat kasus tentang meninggalnya nasabah dalam akad *mushārah*. Dalam kasus ini juga membutuhkan penjelasan tentang diperbolehkannya meneruskan atau memberhentikan akad *mushārah* apabila terdapat nasabah yang meninggal dunia.

[illegible]

Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menekankan ke arah kewarisan dalam akad *mushārah* bilamana terdapat nasabah yang meninggal dalam akad tersebut. Kemudian membahas tentang kriteria umur ahli waris dalam akad *mushārah* dengan menggunakan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Tesis dengan judul “Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah”, ditulis oleh Neila Hifzhi Siregar, S.H.I (1520310097), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

Pada tesis ini, peneliti membahas tentang beberapa akad dalam perbankan syariah seperti *waḍī'ah*, *qard*, *musāqah*, *muzāra'ah*, *shirkah*, *rahn*, *kafālah*, dan *ijārah* bilamana dalam akad-akad tersebut terdapat salah satu pihak ada yang meninggal dunia.

Persamaan tesis tersebut dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah dalam tesis tersebut terdapat akad *shirkah* yang harus berakhir oleh karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia yang mana di dalam putusan yang diteliti penulis juga memaparkan tentang almarhum Ongku Sutan Harahap yang meninggal pada saat perjanjian kontrak akad *mushārah* dengan PT. Bank Sumut Syariah belum berakhir.

<sup>15</sup> Modakir Soleh, *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi - UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017).

3. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)”, ditulis oleh Esa Putri Yuliana (105010107111076), mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014.

<sup>16</sup>Neila Hifzhi Siregar, *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah* (Tesis - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang.<sup>17</sup>

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Esa Putri Yuliana dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris atas pembiayaan di bank syariah.

Namun keduanya terdapat perbedaan. Esa Putri Yuliana hanya meneliti tentang status ahli waris terhadap utang pewaris di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang. Ahli waris yang diteliti Esa Putri Yuliana tidak mematok umur. Sedangkan peneliti juga meneliti tentang umur ahli waris. Pada studi kasus yang diteliti penulis terdapat ahli waris belum cakap hukum yang dibebani tanggung jawab atas pelunasan pembiayaan akad *mushārahah* orang tuanya pada bank sumut syariah.

#### D. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan tinjauan terhadap putusan ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus posisi Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tentang tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas

<sup>17</sup> Esa Putri Yuliana, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)*, (Skripsi – Universitas Brawijaya, Malang, 2014)





- ## F. Metode Penelitian

Agar skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya penyusunan secara jelas dan ilmiah. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:











akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Yaitu tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn yang mana dalam putusan tersebut ada salah satu pihak meninggal dan menyebabkan ahli waris bertanggung jawab atas pelunasan pembiayaan,,*mushārah* yang telah dijalankan orang tuanya. Dan dalam kasus ini terdapat ahli waris yang masih di bawah umur ikut diberikan tanggungan pelunasan tersebut.

- b. Pola pikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang *mushārah* dalam pengertian dan sistematika yang luas,, lalu,, ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

*Bab Pertama*, memuat Pendahuluan yang memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

<sup>22</sup> Bambang Sanggono. *Metode Penelitian Hukum*. 34

*Bab keempat*, berisi tentang analisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Tanggung Jawab Ahli Waris di Bawah Umur atas Pelunasan Pembiayaan Akad *Mushārah* Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah Yang mana semua itu melibatkan kompilasi hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Kitab Undang-undang hukum perdata.

[illegible]



*“Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”*

## 2. Menurut Hanabillah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ.

*“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf).”*

### 3. Menurut Syafiiyah

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوحِ.

*“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.”*

#### 4. Menurut Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَ الرَّبْحِ.

*“Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”*

Sedangkan *mushārahah* sendiri menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>27</sup>

Bank Indonesia juga menyatakan bahwasanya *mushārah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk

membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>28</sup>

*“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini.”* (QS. Shad Ayat (24))

### b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِיקَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود والحاكم وصححه أسناده)

*“Dari Abu Hurairah yang dirafakan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati persekutuan temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”(HR. Abu Daud dan Hakim dan yang menyahihkan sanadnya).*

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَوْنَا

*“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.”*

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat untuk memperbolehkan *shirkah*. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Syaife'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*, 183-201

## 1. Syarat akad

Karena *mushārah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: a) syarat berlakunya akad (*In'iqod*), b) syarat sahnya akad (*shihah*), c) syarat terealisasikannya akad (*Nafadz*), dan d) syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, „para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku„akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

## 2. Pembagian proporsi keuntungan

ang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 245



Setiap mitra harus menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Jadi jika seorang mitra menyertakan 40% kerugian, tidak lebih dan tidak kurang, maka akadnya menjadi tidak sah.

Sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti akad *mushārahah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.

Prinsip normal dari akad *mushārah* adalah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk

*Mushārah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi:

- Dalam hal ini, jika aset *mushārah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para pemilik. Akan tetapi jika asetnya tidak likuidasi, maka para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di dalam mitra.

- b) Jika salah seorang mitra meninggal dunia pada saat *mushārah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārah*.

- c) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *mushārah* berakhir.<sup>31</sup>

[illegible]

### 1. *Shirkah Al-Milk*

*Shirkah al-Milk* adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Contoh *shirkah al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

*Shirkah Al-Milk* memiliki pengertian yang sama dengan *shirkah amlak* yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* (muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat) atau *jabari* (karena paksa).<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 131

*Shirkah Al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis<sup>33</sup>:

- <sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 177

ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

c. *Shirkah Wujuh*, yakni akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi deuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *shirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

d. *Shirkah A'mal*, yakni kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *shirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerjasama usaha dalam *shirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

e. *Shirkah muḍārabah*, yakni kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

#### E. Skema Akad *Mushārah*

Dalam pembiayaan akad *mushārah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan sisanya 30% berasal dari nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.





6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

Berakhirnya mushārah dapat disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārah* kapanpun setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
2. Jika salah satu mitra meninggal dunia pada saat *mushārah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modal atau meneruskan kontrak *mushārah*.
3. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *mushārah berakhir*.<sup>35</sup>

Rachmad Syafe'i juga memaparkan perkara-perkara yang membatalkan *shirkah*, menurutnya *shirkah* akan menjadi batal jika terjadi dua hal. Ada

[illegible]

perkara yang membatalkan *shirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

- a. Pembatalan *shirkah* secara umum
  - i. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
  - ii. Meninggalnya salah seorang *sharik*.
  - iii. Salah seorang *sharik* murtad atau membelot ketika perang.
  - iv. Gila.
- b. Pembatalan secara khusus sebagian *shirkah*
  - i. Harta *shirkah* rusak.
  - ii. Tidak ada kesamaan modal.<sup>36</sup>

### G. Hikmah *Mushārah*

Islam sangat menganjurkan saling tolong-menolong di antara sesamanya, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin. Sekat-sekat tersebut harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan saling tolong-menolong dalam mushārahah akan timbul hikmah satu sama lain. Di antara hikmah yang ada pada mushārahah adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerjasama dengan orang yang sudah mampu. Yang merasa mampu dapat menolong yang kurang mampu, dan sebaliknya. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit ditumbangkan dan Islam akan menjadi rahmatan lil ‘ālamii.

<sup>36</sup> Syafe'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*, 183-201

**DESKRIPSI DUDUK PERKARA NOMOR 124/Pdt.G/2013 /PT A.Mdn.**

1. Alamat : Jalan Kapten Sumarsono No. 12, Kelurahan Helvetia Timur,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara (20124) Indonesia

3. Fax : (061) 8467077

## 5. Visi dan Misi :

**"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Medan Yang Agung"**

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

5) "Keadilan, Keikhlasan dan Kebersamaan".

"Bekerja adalah Ibadah".S

Pengadilan Agama melakukan tugas pokok sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

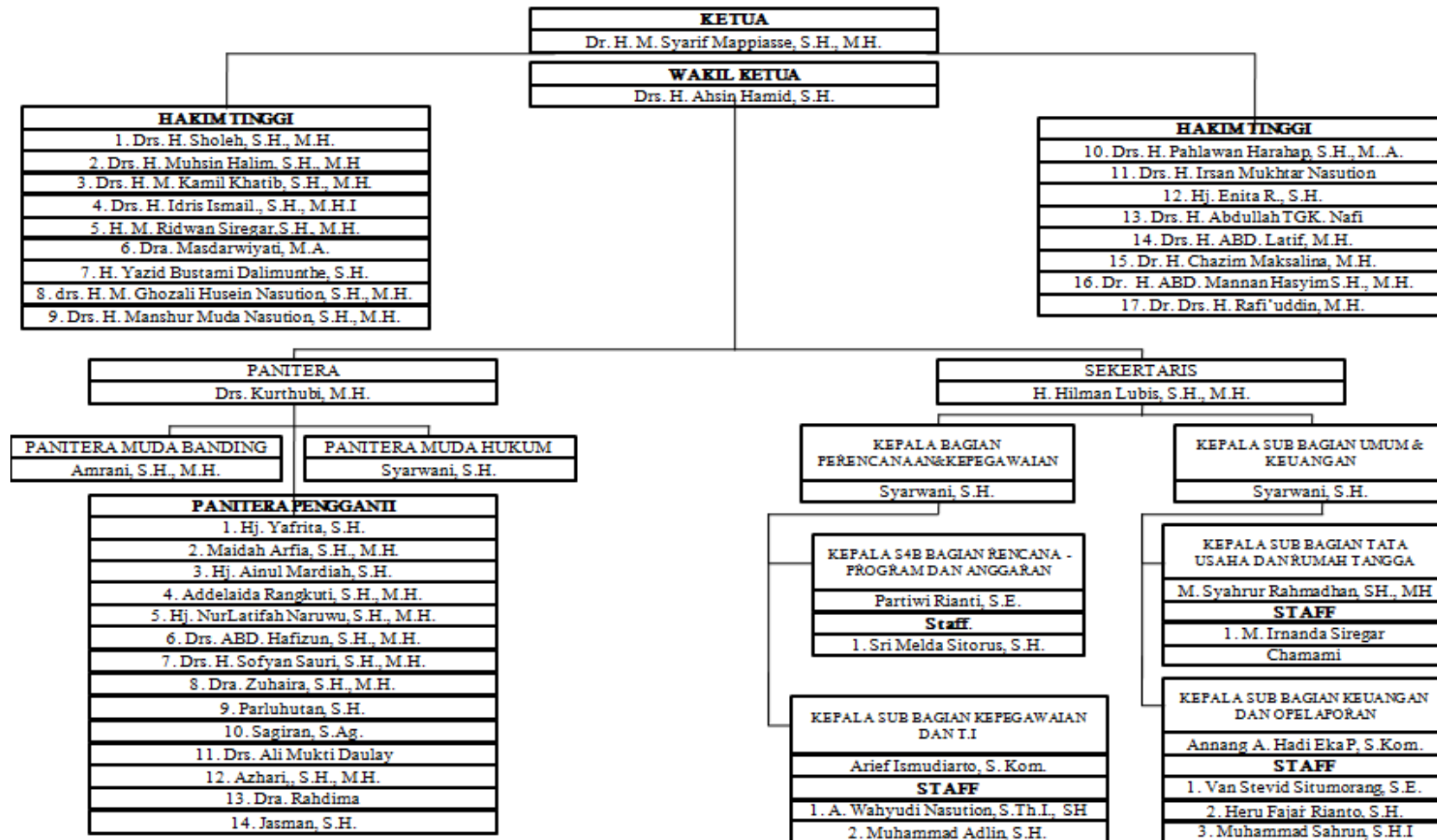
- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari'ah

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Banding.
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- keuangan, dan umum/perlengakapan).
- f) Fungsi Lainnya:
- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain.
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

\_\_\_\_\_. “Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan”, dalam <https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00

## 8. Struktur Kepengurusan Pengadilan Tinggi Agama Meda



## B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn

Pada Tahun 2013, terdapat Putusan dengan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Putusan tersebut telah berada ditingkat banding yang secara otomatis berada dalam wewenang Pengadilan Tinggi Agama. Karena subjek yang berperkara berada di Medan, maka perkara ini ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan

Penulis menemukan data, yakni:

1. Para Pembanding/Tergugat:

- I. PT Bank Sumut Syariah, Cabang Padangsidempuan, diwakili oleh Aminuddin Sinaga sebagai Pimpinan Cabang. PT Bank Sumut Syariah berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12, Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
- II. PT Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 2. Terbanding/Penggugat

- I. PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, diwakili oleh Direktur Utama.  
PT Asuransi Bangun Askrida Syariah berkedudukan di Askrida Tower, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur.
- II. Hj. SARIPAH DALIMUNTHER, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka No 7,



III. Yusliana Dalimunthe, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur:

- 1) Ali Umar Harahap berumur 17 tahun;
- 2) Rudy Machmud Harahap berumur 15 tahun;

IV. Fatma Dini Anggita Harahap;

V. Elza Maryna Harahap;

VI. Elva Azerina Harahap.

Terbanding III adalah istri sah almarhum Ongku Sutan Harahap dan Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI adalah anak kandung dari almarhum Ongku Sutan Harahap. Mereka semua adalah ahli waris yang sah dan mustahq dari almarhum Ongku Sutan Harahap berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/846/KLH/2011. Mereka bertempat tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara.

Dari berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut, penulis menemukan alur perkara yang berawal dari almarhum Ongku Sutan Harahap, salah satu nasabah tetap dari PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I). Selama menjadi nasabah dari Tergugat I almarhum Ongku Sutan Harahap telah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat

waktu dan ia termasuk dalam nasabah yang penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh akad kredit yang ia tanggung.

Pada tanggal 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap membuat Akad Pembiayaan *Mushārah* Nomor 120/KCSY02 APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 dengan PT Bank Sumut Syariah untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan *mushārah* senilai Rp700.000.000,00 untuk jangka waktu selama 12 bulan.

Almarhum Ongku Sutan Harahap menyerahkan agunan kepada Bank berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung...Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap. Selain itu, almarhum Ongku Sutan Harahap juga membayar lunas biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya administrasi senilai Rp8.750.000,00;
2. Biaya notaris senilai Rp1.500.000,00;
3. Biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00;
4. Biaya asuransi kebakaran Rp1.189.408,00;

Total keseluruhan adalah Rp13.609.408,00.

Saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *Mushārah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap dengan PT Bank Sumut Syariah, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia.

Kemudian PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut mengirimkan beberapa surat peringatan. Surat Peringatan Pertama pada tanggal 3 Februari 2012 menyatakan bahwa tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut sebesar Rp752.000.000,00. Lalu Surat Peringatan Kedua dikirim lagi pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Maret 2012.

Ketika telah sampai surat peringatan yang ketiga, Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap merasa keberatan. Surat Peringatan Ketiga tersebut menegaskan bahwa mereka harus menyelesaikan tunggakan tersebut. Tergugat sudah memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan paling lambat tanggal 25 Juni 2012. Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut akan diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan.

Perpanjangan waktu yang diberikan oleh PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut tersebut dikarenakan ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap dinilai belum menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran walaupun berkali-kali dilayangkan Surat Peringatan.

Menurut Para ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap, surat peringatan yang dibuat PT Bank Sumut Syariah dan PT Bank Sumut yang

Oleh karena itu Ibu dari Alm. Ongku Sutan Harahap mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari Akad Pembiayaan *Mushārah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan: “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”.

“Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan





**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PERKARA NOMOR  
124/PDT.G/2013 /PTA.MDN TENTANG TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS  
DI BAWAH UMUR ATAS PELUNASAN PEMBIAYAAN AKAD  
*MUSHARAKAH* ORANG TUANYA PADA BANK SUMUT SYARIAH**

Setelah Perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn diperiksa oleh Mahkamah Agung, terdapat dalil terdahulu saat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan yang menyatakan: ” Saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan *Mushārahah* dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua menyebabkan terhentinya/tertunggaknya pembiayaan *Mushārahah* almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II”. Permasalahan yang kita bahas di sini adalah bagaimana ketika terdapat nasabah yang meninggal dunia pada saat berjalannya akad?

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam waadillatuhu*, cet IV (Darul Fikr: Gema Insani, 2007), 574



<sup>41</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 95

Kemudian Ascharia menambahkan Ahli waris dari nasabah yang meninggal memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārahah*.<sup>43</sup>

Penulis menemukan sebuah literatur yang menjelaskan cara rekonstruksi akad mushārah, yakni dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rekonstruksi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b. Pernyataan kembali (*reconditioning*)

<sup>42</sup> Rinus Pantous, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2006).63-64

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 56.

Namun jika kita menoleh ke pendapat yang disampaikan oleh Ascharia, maka artinya akad *mushārah* ini tidak berhenti begitu saja ketika salah satu nasabah meninggal. Ahli waris bisa meneruskannya. Begitu pula dengan perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn, bank syariah Sumatra Utara menawarkan agar ahli waris dapat melanjutkan akad yang telah dijalankan oleh Alm. Ongku Sultan Harahap.

Dalam dokumen putusan perkara tingkat pertama, Bank Sumut Syariah meminta agar ahli waris Ongku Sultan Harahap meneruskan akad tersebut

<sup>44</sup> *Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90-91

Jika akad *mushārah* tersebut memang diteruskan oleh pihak ahli waris, maka akad *mushārah* tersebut menurut penulis jenisnya menjadi *shirkah al-milk*, yang artinya kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

Dalam kasus itu pula terdapat penagihan bank syariah kepada ahli waris Alm. Sultan Harahap. Tagihan tersebut karena semua bank memang pada dasarnya berorientasi pada bisnis, sehingga mereka tentunya tidak mau rugi sedikitpun. Oleh karena itu tanggungan sisa pelunasan akad *mushārahah* mereka anggap hutang dan menagihnya kepada pihak ahli waris.

Hukum Islam memang mewajibkan kepada keluarga pewaris untuk secepatnya menyelesaikan pelunasan hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris. Jika harta peninggalan yang dipunyainya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka sudah selayaknya tanggung jawab terhadap pelunasan hutang-hutang pewaris dibebankan kepada para ahli waris.<sup>45</sup>

Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang-utang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta-harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan Menagih piutang milik ahli waris. Tanggung jawab ahli

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 5

Dalam hukum formal seperti BW sangat menekankan tentang pelunasan hutang. Tentang pembayaran utang-utang si pewaris telah diatur oleh pasal 1100 sampai dengan pasal 1111 BW. Pada pasal 1100 menyatakan bahwa:

- a) Kewajiban membayar hutang hanya dibebankan kepada ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa syarat (*aanvaarden*).
- b) Besar kecilnya beban membayar hutang ini disesuaikan dengan yang mereka terima.<sup>46</sup>

Dari sini penulis dapat diambil garis besar yakni akad *mushārah* yang dimiliki oleh nasabah yang telah meninggal dunia boleh diturunkan kepada ahli warisnya. Dan jika ahli warisnya berkeberatan untuk meneruskannya maka ahli waris harus melunasi hutang yang timbul akibat dari perjanjian akad *mushārah* tersebut.

<sup>46</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 6-7



Anak kecil yang belum cukup umur harus diberikan pembatasan dalam melakukan hal apapun. Penulis menemukan beberapa pendapat tentang pembatasan anak kecil. Menurut literatur Islam, ia tergolong dalam *hajru*.

*Hajru* menurut bahasa berarti *tadyiq wa mana'u* (membatasi dan menghalangi). Sementara itu, pengertian *hajru* menurut istilah adalah:

منع الإنسان من التصرف في ماله

*“Membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya”*

Hanafiyah menyatakan *hajru* merupakan:

عبارة عن منع مخصص، متعلق بشخص مخصص، عن تصرف مخصص

*“ungkapan yang dipergunakan terhadap pencegahan tertentu untuk orang tertentu dan terhadap tindakan hukum tertentu”.*

Pencegahan yang dimaksudkan Hanafiyah dari definisi ini adalah terhadap anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya, untuk melakukan tindakan hukum.

Malikiyah juga berpendapat *hajru* adalah:

صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته

*“Sifat hukmiah (ketetapan hukum syara’) yang menyebabkan seseorang tercegah membelanjakan hartanya secara langsung melebihi kemampuannya”.*

Dari definisi ini, *hajru* menurut Malikiyah berlaku bagi anak kecil, orang gila, orang lemah akal, orang bangkrut, dan lain sebagainya. Mereka ini mencegah membelanjakan hartanya melebihi kemampuannya.





Q.S An-Nisa ayat 5 tersebut bisa dijabarkan sebagai penjelasan tentang bagian *hajru*:

- <sup>49</sup> Dapatermen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Dapartermen Agama, 1989), 141

b. *Hajru* (pembatasan untuk menjaga haknya sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Anak kecil, yaitu anak-anak yang belum baligh (dewasa). Mereka dilarang mentransaksikan hartanya kecuali atas izin orang tua atau wali. Pemeliharaan orang hartanya berlangsung sampai anak itu baligh (dewasa) dan mampu mentransaksikan hartanya sendiri.

Hal ini telah digariskan Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

2. Orang yang hilang akal (gila dan bodoh) dilarang membelanjakan hartanya sampai dia sembuh, yaitu sempurna kembali akalnya seperti semula.
3. Pemboros atau orang yang menysia-nyiakan hartanya.



lain, maka ia wajib bertanggung jawab langsung.<sup>52</sup> Jadi subjek yang tidak cakap hukum masih dikenai kewajiban atas perbuatannya yang tergolong kecil atau sepele.

Kemudian mengenai pengadaan perbuatan hukum, BW mengatakan bahwa terdapat suatu ketentuan bahwa yang berhak untuk mengadakan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Sedangkan orang yang di bawah umur (*minder jarig*) tidak boleh.<sup>53</sup>

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara syariah.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Kecakapan penerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul wujub*.
- b. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wujub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal.
- c. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul ada' an-naqishah*), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.

<sup>52</sup> Ibid 324

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 5

- d. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada' al-kamilah*), yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal dunia.<sup>54</sup>

Kecakapan menerima hukum di sini dapat kita artikan sebagai suatu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban.

Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri sehingga oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibunya sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika dalam kandungan ibunya kecakapannya masih belum sempurna.<sup>55</sup>

Anak yang berada dalam kandungan ibunya masih memiliki kecakapan yang masih belum sempurna karena pada saat ia dalam kandungan subjek hukum hanya cakap menerima hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Setelah lahir kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu ia cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Dan kecakapan ini berlangsung hingga ia meninggal dunia. Hanya saja, Kecakapan ini ketika berada di periode kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum Syariah.<sup>56</sup> Artinya,

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 106

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 107

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 108

Bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz. Yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal. Hanya saja subyek hukum dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang secara individual, tetapi juga meliputi badan hukum, seperti dalam fiqih dikatakan bahwa baitulmal adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan baitul maal dapat berutang piutang.

[illegible]



itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan dapat ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun.<sup>57</sup>

Ahli-ahli hukum Hanafiyah juga menyatakan dewasa itu adalah usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan.

Dalam buku Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar mengatakan bahwa sekedar baligh saja belum cukup bagi seseorang untuk disertai harta kekayaan. Melainkan harus disertai syarat yang kedua, yakni kematangan (*ar-rusyd*). *Ar-rusyd* secara harfiah berarti kemampuan bertindak secara tepat (*ishabatul-haqq*). Dan menurut Al-Kasani, *ar-rusyd* adalah sikap yang benar dan terkendali dalam tindakan mengelola kekayaan.<sup>o^</sup>

Oleh karena itu, *ar-rusyd*, kita terjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan kematangan. Kita melihat bahwa anak usia 15 tahun (anak SMP) belum begitu matang dalam berpikir, apalagi untuk bertindak menyangkut kekayaan. Oleh karena itu untuk menentukan kedewasaan dalam lapangan hukum kekayaan (*muamalat maliah*), penulis buku ini cenderung kepada pendapat fukaha Hanafi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun. Karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena sesuai kata al-Mawardi, tidak ada dasar perbedaan itu.<sup>o^</sup>

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 110

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 119

<sup>59</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 121



Batas umur kecakapan anak juga ditentukan dalam KUH Perdata pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.<sup>60</sup>

Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum menegaskan bahwa seseorang dipandang memiliki,, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.<sup>61</sup>

Atas apa yang telah dipaparkan oleh KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka menjadi sangat jelas bahwa anak di bawah umur 18 dianggap tidak cakap hukum.

Namun, Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah memberikan fase-fase anak dalam hal hukum dan hakkewajiban dan tanggung jawab.

Berikut ini fase anak dalam hal kecakapan hukum hak kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Periode janin

Janin dalam kandungan ibu mempunyai kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Ia tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban. Ia dapat

<sup>60</sup> Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>61</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum

b. Periode anak-anak

Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak dari sejak lahir hingga mencapai usia tamyiz (12 tahun). Dalam periode ini anak mumayyiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak, dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut ini:

- 1) Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perintah wali karena tindakan hukum yang dilakukan wali itu adalah dalam namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

b. Periode anak-anak

Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak dari sejak lahir hingga mencapai usia tamyiz (12 tahun). Dalam periode ini anak mumayyiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak, dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut ini:

- 1) Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perintah wali karena tindakan hukum yang dilakukan wali itu adalah dalam namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

b. Periode anak-anak

Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak dari sejak lahir hingga mencapai usia tamyiz (12 tahun). Dalam periode ini anak mumayyiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak, dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut ini:

- 1) Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perintah wali karena tindakan hukum yang dilakukan wali itu adalah dalam namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

- b. Periode anak-anak
- Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak dari sejak lahir hingga mencapai usia tamyiz (12 tahun). Dalam periode ini anak mumayyiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak, dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut ini:
- 1) Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perintah wali karena tindakan hukum yang dilakukan wali itu adalah dalam namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

Periode ini dalam hukum Islam mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun hingga usia dewasa. Dalam periode ini, anak di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna juga memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna.

Pada periode ini manusia normal memiliki kecakapan sempurna baik yang pasif (menerima hukum) maupun yang aktif (bertindak hukum). Pada periode dewasa ini seluruh perbuatannya harus dipertanggung jawabkan.

Pada aspek keperdataan, semua pernyataan kehendaknya untuk melahirkan suatu akibat hukum dihormati secara syara' sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, dan seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya apabila melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat di mintai pertanggungjawaban.<sup>62</sup>

Jika kita tinjau lagi kasus di sini, nasabah melakukan perjanjian akad *mushārah* dengan bank syariah Sumut. Maka apa hubungan perjanjian

[illegible]

Akan tetapi, orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, yaitu anak mumayyiz, tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan anak mumayyiz dapat dikategorikan sebagai berikut:

- [illegible]

- Dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- Yang menjadi pertanyaan lagi adalah mengapa Bank Syariah Sumut dan Bank Sumut masih juga menuntut ahli waris yang di bawah umur tersebut? Tidak cukupkah mereka hanya menuntut ahli waris yang sudah cukup umur lainnya?

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16, menyatakan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan suatu hukuman;

<sup>64</sup> Pasal 98Kompilasi Bab XIV

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>65</sup>

Bahkan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwasanya Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>66</sup>

Ini sudah menjadi sangat jelas jikalau sama sekali tidak diperbolehkan melibatkan anak kecil dalam melakukan kontrak perjanjian akad dengan perbankan syariah. Pemikirannya yang masih belum cukup dewasa untuk mengurus dan mentransaksikan hartanya. Jika akad diteruskan dengan melibatkan anak di bawah umur, maka akadnya menjadi tidak sah. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.<sup>67</sup> Syarat yang menyebabkan tidak sah di sini ialah adanya anak di bawah umur yang terlibat dalam pelunasan utang orang tuanya yang telah meninggal di perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan di atas.

Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan al-‘aqd yang jika terdapat Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan dengan kata lain kekurangan kecakapan, seperti contoh Remaja yang mumayyiz, maka Al-‘aqd tersebut disebut mauquf.

<sup>65</sup> Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 16

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197

<sup>67</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidqiyy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 174

<sup>68</sup> M. Hanafiah, *MU'AMALAT dalam Tradisi Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Pers, T.t), 104

**BAB V**

**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan:

1. Kasus posisi perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA yang mana jika terdapat nasabah yang meninggal dalam perjalanan akad Mushārah, maka akad tersebut boleh dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ahli waris memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau melunasi sisa kewajiban Almarhum dengan bank syariah.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam Ahli waris boleh melanjutkan akad dengan bank syariah dengan syarat ia harus cakap dalam bertindak hukum. Batas usia anak yang memiliki cakap hukum ialah umur 18 tahun. Jika ditinjau dari masalah mursalah perkara ini memang menimbulkan ketidakmaslahatan bagi pihak ahli waris. Namun jika anak di bawah umur yang sudah terlanjur terlibat dalam penerusan akad dan atau pembebanan hutang yang dimiliki oleh Almarhum orangtuanya, maka akad tersebut sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan.

## B. Saran

Melihat kasus posisi pada perkara Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA, yang mana melibatkan anak di bawah umur dalam urusan kontrak perjanjian dengan bank syariah, maka sebaiknya pihak keluarga atau ahli waris lain yang cakap







[https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan.](https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan)

Indonesia, D. A. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Dapatermen Agama, 1989.

International Shari'ah Research Academy For Islam Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam*, Terj. Elyn T. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad, Teungku, Hasbi, Ash-Shidiqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*.  
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Pantous, Rinus. *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang: Anjak-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 21 Tahun 2008  
tentang Perbankan Syariah

*Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecakapan Hukum.*

Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

## Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan pengadilan.

*Pasal 171 butir 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.*

*Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelum dewasaan.*

Putri, E. Y. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Kasus di Bank Danamon Syariah Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang*. Skripsi-- Universitas Brawijaya: Malang, 2014.

Rahman, Abdul Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena, 2004
- Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santoso, L. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Siregar, E. I. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Universitas Sumatera Utara: Medan, 2009.
- Siregar, N. H. *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah*. Tesis-- UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017.
- Soleh, M. *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi -- UIN Malik Ibrahim: Malang, 2017.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Tamwif, I. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: UINSA Press, 2014.
- Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Trimuloto. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. *Analisis Potensi Produk Musharakah terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM*, 2017.
- Ulum, Fahrul. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015.
- Wahyudi, A. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar*. Makassar: T.p, 2013.
- NN. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Medan", dalam <https://www.pta-medan.go.id/index.php/12-tentang-pta-medan/profil-pta-medan>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2019, Pukul 22.00